eJournal Ilmu Pemerintahan, 2022, 10 (4): 915-924
ISSN 2477-2458, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
©Copyright 2022

PERAN PETINGGI DALAM PEMBERDAYAAN PETANI DI KAMPUNG INTU LINGAU KECAMATAN NYUATAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Veronika[1], H. Masjaya[2], Budiman[3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan tentang peran petinggi dalam pemberdayaan petani di Kampung Intu Lingau. Penelitian ini menggunakan tiga indikator yaitu motivator, fasilitator dan motivator untuk mengetahui bentu pemberdayaan petani yang dilakukan oleh pemerintah kampung serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran petinggi dalam mewujudkan pemberdayaan petani. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan adalah pusposive sampling dan accidental sampling. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Petinggi kampung sebagai motivator dalam pemberdayaan petani di kampung Intu Lingau sebagai motivator telah memberikan motivasi atau dorongan kepada perangkat kampung dan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan penyelenggaraan kampung. Dengan begitu maka terlihat jelas bahwa peran petinggi kampung sebagai motivator sangat diperlukan dalam proses meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kampung intu lingau sebagai sentra pertanian. Kepala kampung sebagai fasilitator diharapkan oleh orang-orang yang difasilitasi dalam segala pengetahuan,dengan memberikan fasilitasi bimbingan pendampingan dan bantuan pelatihan kepada tokoh-tokoh masyarakat, kelompok tani dan masyarakat. Kemampuan kampung dalam melayani masyarakat di Kampung Intu Lingau untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan tugas dan fungsi aparatur kampung yang ada. Petinggi dalam menggerakkan masyarakat yaitu mengumpulkan masyarakat untuk bermusyarwarah sekaligus penyampaian program-program yang ada. Kepala kampung juga membentuk kelompok tani dengan melibatkan. Berdasarkan beberapa wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa peran kepala kampung sebagai mobilisator telah berjalan dengan baik. Bentuk pemberdayaan petani yang dilakukan pemerintah kampung Intu Lingau adalah penyedia bibit-bibit berkualitas baik, penyediaan pupuk, penyedian pestisida dan penyediaan alat-alat pertanian bagi masyarakat. Faktor pendukung kegiatan pemberdayaan petani dikampung Intu Lingau adalah kondisi lingkungan yang sangat baik terutama tanah yang subur sedangkan faktor penghambat dari kegiatanpemberdayaan petani adalah pemikiran masyarakat yang masih belum maju.

Kata Kunci: *Peran, Bentuk Pemberdayaan Petani, Motivator, Fasilitator dan Mobilisator.*

---

[1] Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
Email: veronikaayuu@gmail.com
[2] Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
[3] Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Lahirnya UU No 6 Tahun 2014, menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan di desa, meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, serta lahirnya otonomi daerah di era globalisasi, menuntut pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. pelayanan yang berkualitas, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat agar masyarakat terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya. Untuk menjalankan amanat Undang-Undang tersebut pemerintah desa harus mendapatkan dukungan dari aparatur pemerintah yang profesional, berkompeten dan memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia di daerahnya dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kampung Pasal 1 Ayat 5 menyatakan Kampung adalah nama lain dari desa di wilayah Kabupaten Kutai Barat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah dan hak untuk diakui dan dihormati hak tradisionalnya. Oleh karena itu, kampung adalah nama desa dalam bahasa umum warga di lingkungan pemerintahan Kutai Barat, sehingga masyarakat Kutai Barat tidak mengenal kata desa melainkan kampung. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Kampung Bab 1 Ayat 1 Ayat 8 mengatur bahwa Petinggi adalah pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban mengurus rumah tangga desa dan menjalankan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan landasan inilah maka istilah desa di lingkungan kabupaten Kutai Barat lebih dikenal dengan sebutan kampung dan setiap kampung yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Barat dipimpin oleh seorang petinggi atau dengan istilah lain dikenal dengan sebutan kepala desa.

Kampung Intu Lingau memiliki potensi ekonomi yang besar terutama di sektor pertaniannya, sumberdaya alam yang melimpah dapat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan yang mata pencaharian utamanya bersumber dari hasil-hasil pertanian hal ini di dukung oleh kondisi tanah yang subur dan curah hujan yang tidak terlalu tinggi. Sebagai salah satu contoh adalah padi yang di budidayakan masyarakat adalah padi gunung (tanpa irigasi) jadi hanya memanfaatkan kesuburan tanah dan curah hujan sehingga masyarakat hanya perlu merawat dan menjaga tanaman padi dari hama dan tumbuhan liar yang mengganggu. Namun sayangnya masih ada kendala yang dihadapi oleh masyarakat seperti cara pengelolaannya dan pemasaran hasilnya sehingga masyarakat belum optimal dalam memasarkan hasilnya. Ditambah dengan kurangnya wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang cara-cara bertani karena sebagian besar masyarakat hanya menggunakan cara tradisional yang hanya mengharapkan kesuburan tanah dan cuaca yang ada. Dalam hal ini pemerintah Kampung Intu Lingau belum optimal dalam memberikan pengenalan, pelatihan maupun pendampingan terhadap petani Kampung Intu Lingau. Pemberdayaan petani merupakan usaha yang dilakukan untuk menjadikan masyarakat terutama petani untuk lebih berdaya ataupun mampu menjawab permasalahan ekonomi ataupun lingkungannya. Besarnya kebutuhan masyarakat di sektor pertanian maka perlu adanya pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan petani.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Bab 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan

"Pemberdayaan Petani adalah segala upaya dan pelatihan, konsultasi dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melakukan usaha pertanian yang lebih baik melalui pendidikan, mengembangkan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, mengkonsolidasikan dan mengamankan lahan pertanian, mendorong akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta memperkuat kelembagaan petani. Lewat pemberdayaan masyarakat terutama petani diharapkan dapat membuka ruang dan kesempatan bagi petani untuk mendapat dukungan agar lebih produktif.

Kerangka Dasar Teori

Peran

Soekanto (2002:21) mendefinisikan peran sebagai aspek dinamis dari kedudukan (status) dimana seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dan kemudian orang tersebut mengambil peran. Peran, Riyadi (2002: 138) mengartikan peran sebagai orientasi dan konsepsi dari apa yang dimainkan oleh suatu kelompok dalam oposisi sosial. Dengan peran ini, para aktor baik individu maupun organisasi bertindak sesuai dengan harapan masyarakat atau lingkungan. Peran juga dapat diartikan sebagai persyaratan yang diberikan secara struktural (norma, harapan, tanggung jawab, dll.).

Pada dasarnya, peran juga dapat direpresentasikan sebagai serangkaian tindakan tertentu yang disebabkan oleh suatu posisi. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana karakter dimainkan. Pada dasarnya tidak ada perbedaan peran yang dimainkan/dimainkan oleh pemimpin atas, menengah dan bawah, mereka akan memainkan peran yang sama.Peran adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai tempat dalam suatu situasi sosial, dan istilah peran meliputi tiga hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan status atau status seseorang dalam masyarakat, peran dalam pengertian ini adalah seperangkat norma yang menjadi pedoman seseorang dalam kehidupanbermasyarakat.
2. Peran adalah konsep tindakan apa yang dapat dilakukan seorang individu sebagai organisasi dalam masyarakat.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai tindakan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pemerintah Desa

Budiarti (2016:12) Pemerintah desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah kepala desa atau biasa disebut kader desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan kader desa dan bertanggung jawab untuk mengelola sistem pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberian layanan dan pengembangan masyarakat desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau nama lain yang dibantu oleh perangkat desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berhak:

a. Memimpin dan melaksanakan pemerintahan desa
b. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
c. Memegang pengelolaan aset dan keuangan desa
d. Menetapkan peraturan desa

e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
f. Memajukan kehidupan masyarakat pedesaan.
g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
h. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Kepemimpinan

Tead dkk (dalam Kartono, 2003: 55) Kepemimpinan adalah kegiatan atau seni mempengaruhi kerja sama orang lain, berdasarkan kemampuan individu untuk membimbing orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan kelompok.

Peran kepemimpinan Tjokroamidjojo (2000:42) adalah:

1. Motivator
   Motivator adalah suatu dorongan, rangsangan, pengaruh, atau perangsang yang diberikan oleh orang lain yang menyebabkan orang yang dimotivasi itu menuruti atau melakukan apa yang dimotivasi itu secara kritis, rasional, dan bertanggung jawab.
2. Fasilitator
   Fasilitator adalah seseorang yang membantu memfasilitasi proses komunikasi sekelompok orang agar bersama-sama mereka dapat memahami atau memecahkan suatu masalah.
3. Mobilisator
   Mobilisator adalah mereka yang mengarahkan atau mengambil tindakan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan untuk kepentingan bersama.

Pemberdayaan

Huraerah (2011:103) menyatakan bahwa ada lima tingkatan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

a. Dapat memenuhi kebutuhan dasar
b. Keterjangkauan sistem sumber atau aksesibilitas layanan publik
c. Sadar akan kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan lingkungan
d. Kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan yang lebih luas
e. Kemampuan untuk mengontrol diri sendiri dan lingkungan. Tingkat kelima dapat dilihat dari berbagai program dan kebijakan instansi dan pemerintah yang terlibat dalam pengendalian dan evaluasi.

Mardikanto (2017:40) Konsep pemberdayaan masyarakat meliputi konsep *community development dan community based development*. Dalam memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu :

1. Menciptakan suasana dimana potensi masyarakat dikembangkan (*empowered*). Titik awal di sini adalah pengakuan bahwa setiap individu dan setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan. Artinya pemberdayaan adalah upaya memperkuat diri dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikiserta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Meningkatkan potensi atau daya (*empowerment*) masyarakat da lam hal ini, tindakan yang lebih aktif perlu dilakukan selain menciptakan iklim dan atmosfer. Intensifikasi ini mencakup cara dan langkah konkrit serta melibatkan pemberian

masukan dan membuka jalan bagi peluang untuk memberdayakan masyarakat. Tentunya dalam upaya ini diperlukan dukungan finansial, teknis, informasi, ketenagakerjaan dan pasar.

3. Pemberdayaan juga berarti perlindungan. Dalam proses pendelegasian, yang lemah harus dicegah menjadi lebih lemah, karena yang lemah tidak berdaya melawan yang kuat.

Petani

Hadiutomo (2012:2) mendefinisikan Petani adalah seseorang yang melakukan kegiatan pertanian di atas lahan yang subur untuk memperoleh keuntungan ekonomi, antara lain bercocok tanam di kebun, ladang, sawah, perikanan, dan lain-lain. Petani dibedakan dari bentuk kegiatannya yaitu penggarap, petani penggarap, petani penggarap, petanisebagai buruh tani.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang tujuannya untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan kemudian data disajikan secara sistematis, akurat dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya ada sebuah fokus penelitian, sehingga dapat memberikan batasan informasi sesuai dengan fenomena yang akan diteliti. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini yang akanmembatasi pembahasan yaitu :

1. Peran Petinggi dalam Pemberdayaan Petani Di Kampung Intu LingauKecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat meliputi :
   1.1 Peran Petinggi sebagai Motivator
   1.2 Peran Petinggi sebagai Fasilitator
   1.3 Peran Petinggi sebagai Mobilisator
2. Faktor pendukung dan penghambat Peran Petinggi Dalam Pemberdayaan Petani Di Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat.

Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ketersediaan data adalah faktor pendukung untuk mempermudah peneliti mendapatkan suatu informasi. Data dibutuhkan untuk menarik kesimpulan yang akan menentukan hasil dari penelitian yang dilakukan. Untuk penentuan informan, digunakan teknik *Purposive Sampling* yakni dalam memilih sampel dengan ada penilaian tertentu yang mampu memberikan data-data secara optimal, misalnya orang tersebut dianggap memiliki pengetahuan lebih sesuai yang kita inginkan, atau sebagai kepemimpinan sehingga dapat memudahkan penelitian mengetahui objek atau kondisi sosial. (Sugiyono, 2017: 218-219). Dan teknik *Accidental Sampling* yaitu teknik memperoleh sampel secara kebetulan dan acak berdasarkan siapapun yang ditemui peneliti dan dianggap cocok sebagai informan (Sugiyono, 2013: 96).

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2, yakni :

1. Data Primer
   Penulis menggunakan sumber data primer yang berasal dari observasi lapangan dan wawancara dengan informan terkait. Dalam penelitian ini terdapat beberapa informan yang akan menjadi narasumber untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:

   a) Wawancara dilakukan dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM) dan Petinggi Kampung Intu Lingau. (Menggunakan teknik *purposive sampling*).
   b) Petani Kampung Intu Lingau (Menggunakan teknik *accidental sampling*). Dalam penelitian ini Petani yang menjadi narasumber berjumlah 7 orang.
2. Data Sekunder
   Selain itu dalam melakukan penelitian penulis juga menggunakan data sekunder yang didapatkan dari dokumen-dokumen, undang-undang, arsip desa ataupun yang didapat dari sumber lain yang mendukung proses penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data dokumen adalah profil Kampung Intu Lingau Tahun 2021.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Motivator

Maka Kepala kampung sebagai motivator harus mampu memberikan pengaruh dalam mewujudkan pemberdayaan petani. Kepala kepala kampung dalam hal ini, menjadi motivator adalah seseorang yang memberikan dorongan untuk mencapai tujuan agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Kepala desa harus selalu memberikan motivasi serta masukan dan dukungan dengan mendorong perangkat pemerintah desa. Selain itu, kepala desa merupakan pemimpin yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat.

Fasilitator adalah seseorang yang menawarkan bantuan untuk memfasilitasi proses komunikasi sekelompok orang sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama. Kepala desa sebagai fasilitator diharapkan difasilitasi, difasilitasi dengan memberikan pendampingan dan pelatihan bantuan kepada tokoh masyarakat, kelompok tani dan masyarakat. Kemampuan desa untuk melayani masyarakat

Bentuk-bentuk motivasi yang diberikan oleh Petinggi Kampung Intu Lingau untuk mewujudkan pemberdayaan petani adalah dengan memberikan dukungan emosional yaitu memberi dorongan dan semangat dengan menunjukan simpati kepada para petani, kemudian memberikan dukungan nyata yaitu berupa bantuan Pinjaman Lunak tanpa bunga kepada BUMKAM bagi para petani yang tidak memiliki modal serta menyediakan bibit-bibit pertanian berkualitas baik untuk meningkatkan hasil pertanian, menyediakan pupuk dan pestisida untuk mendukung para petani dalam kegiatan pertaniannya. Selain itu Petinggi juga memotivasi petani dengan menjaga komunikasi yang baik dengan petani sebagai upaya mewujudkan pemberdayaan petani.

Fasilitator

Peran Petinggi kampung sebagai fasilitator dapat dilihat dari tugas dan kewajiban petinggi kampung dalam memfasiitasi masyarakat Kampung Intu Lingau. Kepala desa sebagai fasilitator diharapkan dapat memfasilitasi yaitu dengan memberikan pendampingan dan pelatihan serta bantuan kepada tokoh masyarakat, kelompok tani dan masyarakat umum

untuk melayani masyarakat di Kampung Intu Lingau. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat merupakan tugas dan fungsi aparatur kampung yang ada.

Bentuk-bentuk Fasilitas yang diberikan oleh Petinggi kepada Petani dalam upaya mewujudkan pemberdayaan Petani adalah dengan menyediakan alat-alat pertanian seperti Kultivator dan Mulsa untuk mendukung kegiatan pertanian menjadi lebih mudah. Selain itu Petinggi juga berperan dalam hal pemasaran hasil pertanian yaitu dengan cara bekerja sama dengan pihak ketiga agar petani mendapat pasaran yang jelas serta tetap. Selain itu Petani juga berperan dalam hal infrastruktur dalam bentuk perbaikan akses jalan tani dan jembatan bagi petani untuk mendukung kegiatan pertanian. Kemudian dalam upaya pemberdayaan petani petinggi juga berperan untuk pengadaan hidran air bagi masyarakat terutama petani hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung kegiatan pertanian yang tidak pernah lepas dari air.

Motivator

Petinggi kampung sebagai mobilisator ialah orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Peran kepala kampung sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan rasa kepedulian antar masyarakat. Menggerakan masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung sangat penting dimana Kepala Kampung Intu Lingau selalu mengajak aparatur kampung untuk menggerakkan masyarakat dan berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program kampung. Seperti dalam sektor perkonomian, pembangunan, pendidikan, kesehatandan lingkungan.

Petinggi berperan dalam hal memobilisasi petani dapat dilihat dari upaya pembentukan kelompok tani untuk mempermudah proses komunikasi, koordinasi dan pemberian bantuan kepada petani. Hal ini dilakukan sebagai upaya dari petinggi sendiri untuk mewujudkan pemberdayaan petani agar petani di Kampung Intu Lingau lebih berkembang dan lebih maju. Kemudian petinggi juga memobilisasi petani untuk melakukan pertemuan dan musyawarah agar hubungan antara petinggi ataupun pemerintah kampung kepada petani tetap terjaga agar upaya mewujudkan pemberdayaan petani dapat maksimal.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peran Petinggi Dalam Pemberdayaan Petani

Peran Petinggi Dalam Pemberdayaan Petani Di Kampung Intu Lingau juga tidak lepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan penelitian yang saya lakukan di Kampung Intu Lingau mengenai pemberdayaan petani yang dilakukan petinggi Kampung Intu Lingau, , dapat diketahui adanya faktor pendukung dan penghambat terlaksananya pemberdayaan petani dilakukan petinggi kampung. Berikut faktor pendukung pemberdayaan petani di kampung Intu Lingau.

1. Sumber Daya Alam

   Potensi terbesar yang menjadi keunggulan dari Kampung Intu Lingau yang dapat mendukung terwujudnya pemberdayaan petani adalah sumber daya alam nya. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil-hasil alam. Tinggal bagaimana pemanfaatan sumber daya

alam tersebut menjadi keuntungan bagi masyarakat terutama bagi Kampung Intu Lingau sendiri. Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sumber daya alam yang ada di Kampung Intu Lingau menjadi hal yang sangat berpengaruh dan mendukung terwujudnya pemberdayaan petani di Kampung Intu Lingau.

2. Dana/Anggaran

   Dana atau anggaran juga menjadi hal yang sangat penting dan mempengaruhi terwujudnya pemberdayaan petani di Kampung Intu Lingau. Dengan adanya anggaran maka akan ada bantuan-bantuan bagi para petani untuk mendukung kegiatan pertanian yang baik. Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dari peran petinggi dalam mewujudkan pemberdayaan petani.

Faktor Penghambat

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat faktor-faktor penghambat dari terwujudnya pemberdayaan petani. Faktor penghambat ini adalah hal yang menjadi hambatan atau kendala dalam mewujudkan pemberdayaan petani.

1. Pola Pikir Masyarakat Yang Belum Maju

   Faktor utama dalam terhambatnya pemberdayaan petani di Kampung Intu Lingau adalah kesadaran masyarakat terhadap pertanian moderen dan juga kesadaran masyarakan dalam mengembangkan usaha dan ekonomi. Dilain sisi bagi petani dalam mengembangkan usaha tani mereka masih berkantung pada iklim serta terkendala oleh hama.

2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

   Kurangnya masyarakat yang benar-benar serius untuk membuka lahan besar untuk kegiatan pertanian, kebanyakan masyarakat bertani untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari agar tidak membeli. Hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan dan menghambat peran petinggi dalam upaya pemberdayaan petani, karena tidak adanya sinergitas antara petani dan petinggi.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Petinggi kampung sebagai motivator dalam pemberdayaan petani di kampung Intu Lingau sebagai motivator telah memberikan motivasi atau dorongan kepada perangkat kampung dan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan penyelenggaraan kampung. Dengan begitu maka terlihat jelas bahwa peran petinggi kampung sebagai motivator sangat diperlukan dalam proses meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kampung intu lingau sebagai sentra pertanian. Dengan hal tersebut tentunya mendapat respon yang positif dari perangkat kampung dan masyarakat Kampung Intu Lingau karena adanya dorongan dan bimbingan dari Kepala Kampung Intu Lingau sehingga semua dapat berjalan dengan sangat baik.
2. Petinggi Kampung Intu Lingau sebagai fasilitator telah berupaya mewujudkan pemberdayaan Petani adalah dengan menyediakan alat-alat pertanian seperti

Kultivator dan Mulsa untuk mendukung kegiatan pertanian menjadi lebih mudah. Selain itu Petinggi juga berperan dalam hal pemasaran hasil pertanian yaitu dengan cara bekerja sama dengan pihak ketiga agar petani mendapat pasaran yang jelas serta tetap. Selain itu Petani juga berperan dalam hal infrastruktur dalam bentuk perbaikan akses jalan tani dan jembatan bagi petani untuk mendukung kegiatan pertanian.

3. Kepala kampung dalam menggerakkan masyarakat yaitu mengumpulkan masyarakat untuk bermusyarwarah sekaligus penyampaian program-program yang ada. Kepala kampung juga membentuk kelompok tani dengan melibatkan. Berdasarkan beberapa wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa peran kepala kampung sebagai mobilisator telah berjalan dengan baik.

Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan petani di kampung Intu Lingau, antara lain:

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung peran petinggi dalam mewujudkan pemberdayaan petani di Kampung Intu Lingau adalah kondisi lingkungan yang baik dan sumber daya alam yang masih melimpah. Dan salah satunya adalah tanah yang subur sehingga mendukung kegiatan pertanian. Oleh karena itu Kampung Intu Lingau di dukung menjadi sentra pertanian. Selain itu didukung juga oleh anggaran yang telah ditetapkan untuk bidang pertanian.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat dari peran petinggi dalam mewujudkan pemberdayaan petani adalah pola pikir masyarakat atau petani yang masih tradisional dan belum maksimal dalam menerima kemajuan zaman. Banyak masyarakat yang tidak sadar akan potensi-potensi yang bisa dikelola dan kebanyakan masya rakat hanya bertani dengan cara-cara tradisional sehingga hasil pertanian yang didapatkan tidak maksimal.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah dipaparkan maka saran yang diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Peran Petinggi kampung sebagai motivator adalah yang paling utama, dimana dalam mendorong dan mengarahkan masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan petani di kampung Intu Lingau. Dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan- kegiatan pemberdayaan yang diadakan.
2. Untuk memaksimalkan fasilitasi kepada masyarakat salah satu yang harus dilakukan oleh petinggi kampung adalah lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Sebagai mobilisator petinggi kampung harus lebih meningkatkan dalam melakukan dorongan dan menggerakkan seluruh masyarakat lebih banyak lagi.

Daftar Pustaka

Buku

Hadiutomo, Kusno. 2012. *Mekanisme Pertanian*. Bogor: IPB Press.

Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Edisi Kedua. Bandung: Humaniora

Kartono. 2003. *Beyond Leadership (12 Konsep Kepemimpinan)*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.

Mardikanto, Soebianto. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.

Riyadi, 2002, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramefia, Jakarta.

Soekanto. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono, 2008. Metode *Penelitian Kuntitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Jakarta: Rajawali.

Skripsi

Budiarti, M. (2016). *Kesiapan Dan Strategi Pemerintah Desa Dalam Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara. Universitas Bandar Lampung: Tidak Diterbitkan.

Dokumen-dokumen

Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasidan Tata Kerja Pemerintah Kampung Pasal 1 Ayat 5

Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Kampung Bab 1 Pasal 1 Ayat

Per undang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 1 Bab 1